



Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat

Kasan K. Suantha, Risma Yanti

Universitas Teknologi Digital, Indonesia

Email: kasansuantha@digitechuniversity.ac.id

Alamat: Jl. Cibogo No. Indah 3, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, 40000

Korespondensi penulis: ririmayanti7@email.com

Abstract. Local governments play an important role in improving the welfare of the community through effective and efficient financial management. The APBD functions not only as a financial plan but also as a financial performance measurement tool. However, the financial performance of local governments has not been optimal due to the imbalance between revenue and expenditure, low budget utilization efficiency, and inadequate financial management. This research uses a quantitative-descriptive approach without statistical data testing with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. Based on the research results, the effectiveness ratio of BPSDM West Java Province in 2021-2023 shows effective results with a percentage above 100%. The efficiency ratio is at an average level of 9.56%, which shows low efficiency or is categorized as less efficient. In addition, the activity ratio shows that operations are greater than investment expenditures, and the growth ratio shows very unstable, but shows strong potential for recovery if managed properly. The results of this study recommend BPSDM to improve the efficiency of budget management and prioritize spending on facilities and infrastructure that support public services. For future research, it is recommended to add research variables to measure financial performance more comprehensively and extend the research period to produce more accurate findings. This is important to support the improvement of the quality of public services in the future.

Keywords: Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Activity Ratio, Growth Ratio

Abstrak. Pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. APBD berfungsi tidak hanya sebagai rencana keuangan tetapi juga sebagai alat ukur kinerja keuangan. Namun, kinerja keuangan pemerintah daerah belum optimal karena ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, efisiensi penggunaan anggaran yang rendah, serta pengelolaan keuangan yang kurang memadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif tanpa uji data statistik dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, rasio efektivitas BPSDM Provinsi Jawa Barat pada 2021-2023 menunjukkan hasil yang efektif dengan persentase di atas 100%. Rasio efisiensi berada pada tingkat rata-rata 9,56%, yang menunjukkan efisiensi rendah atau dikategorikan kurang efisien. Selain itu, rasio aktivitas menunjukkan bahwa operasional lebih besar dibandingkan belanja investasi, dan rasio pertumbuhan menunjukkan sangat tidak stabil, tapi menunjukkan potensi pemulihan yang kuat jika dikelola dengan baik. Hasil penelitian ini merekomendasikan BPSDM untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta memprioritaskan belanja pada sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik. Untuk penelitian mendatang, disarankan menambah variabel penelitian guna mengukur kinerja keuangan secara lebih komprehensif dan memperpanjang periode penelitian untuk menghasilkan temuan yang lebih akurat. Hal ini penting untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di masa depan.

Kata Kunci: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan

1. LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi yang terjadi saat ini, sektor akuntansi publik di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam penataan keuangan daerah. Efisiensi dan efektivitas dalam manajemen keuangan daerah menjadi elemen kunci dalam mendorong pembangunan suatu wilayah. Daerah yang mampu mengelola keuangannya secara transparan dan akuntabel memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat, sedangkan pengelolaan yang kurang optimal dapat menjadi kendala bagi

kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah memiliki tugas yang strategis dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan layanan publik.

Namun, dalam beberapa periode terakhir ini, kinerja finansial pemerintah daerah masih belum optimal. Beberapa masalah yang dihadapi berkaitan dengan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, efisiensi penggunaan yang masih rendah, dan kualitas pengelolaan keuangan yang masih belum memadai. Analisis Kinerja Keuangan APBD bertujuan untuk menilai keunggulan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah guna mencapai kemandirian dan meningkatkan pelayanan publik. APBD berfungsi sebagai instrumen keuangan untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai program, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga layanan sosial. Indikator efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah sering digunakan sebagai dasar evaluasi.

Analisis Kinerja Keuangan APBD bertujuan untuk menilai keunggulan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah guna mencapai kemandirian dan meningkatkan pelayanan publik. APBD berfungsi sebagai instrumen keuangan untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai program, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga layanan sosial. Indikator efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah sering digunakan sebagai dasar evaluasi.

Data pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada periode 2020 menunjukkan adanya penurunan konsumsi pemerintah dari 3,25% menjadi 1,94%. Penurunan ini disebabkan oleh pengurangan alokasi anggaran untuk infrastruktur pada tahun tersebut, sementara anggaran untuk sektor kesehatan ditingkatkan sebagai respons terhadap penanganan pandemi di Indonesia. Namun, pada tahun 2023, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja positif, tumbuh kuat dan stabil di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mencapai sekitar 5,05%. Oleh sebab itu, analisis kinerja keuangan daerah menjadi langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD.

Penelitian ini bertujuan untuk, Menganalisis kinerja keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan APBD yang dilihat dari rasio efektivitas, Menganalisis kinerja keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan APBD yang dilihat dari rasio efisiensi, Menganalisis kinerja keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan APBD yang dilihat dari rasio aktivitas, Menganalisis kinerja keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan APBD yang dilihat dari rasio pertumbuhan.

Ironisnya, meskipun dana desa dan anggaran pembangunan besar, permasalahan kesejahteraan di pedesaan tetap muncul, seringkali terkait dengan kurangnya transparansi dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya untuk infrastruktur. Muncul pertanyaan bagaimana desa tersebut melaksanakan pengelolaan dana desa dan apakah telah memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Apa saja hambatan manajemen keuangan desa untuk pembangunan sumber daya.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Sari (2016), kinerja keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah. Hal ini mencakup pengelolaan

penerimaan dan belanja daerah, yang dilaksanakan berdasarkan sistem keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam suatu periode anggaran.

Menurut Bastian (2001) dalam Mariana (2020), Evaluasi kinerja mengukur sejauh mana suatu program atau peraturan mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis. Keberhasilan kinerja dapat dinilai melalui standard yang telah ditetapkan lebih dahulu. Kinerja keuangan, semacam bagian dari evaluasi tersebut, mencerminkan hasil dari pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem dalam penilaian kinerja sektor publik menunjang para manajer dalam menilai pencapaian prosedur melalui indikator finansial dan non-finansial. Analisis kinerja keuangan daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pemerintah dalam mengelola anggaran, dengan fokus pada manfaat dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Menurut IAI (2015:69), kinerja keuangan mencerminkan potensi entitas dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang dimilikinya.

Rasio keuangan merupakan alat yang digunakan dalam penilaian kinerja keuangan. Alat pengukuran kinerja keuangan merupakan metode atau indikator yang digunakan guna menilai sejauh mana suatu organisasi, lembaga, atau pemerintah daerah berhasil mencapai tujuan keuangan yang sudah ditetapkan. Hal ini selaras dengan pernyataan Susanto (2019) yang menyatakan kondisi kesehatan keuangan suatu daerah dapat dievaluasi melalui analisis rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan. Berikut beberapa rasio kinerja keuangan yang umum digunakan meliputi:

a. Rasio Efektivitas

Genasih (2022) menjelaskan bahwa semakin baik kinerja keuangan suatu pemerintah daerah, maka akan di tunjukan dengan rasio efektifitas yang tinggi. Dan sebaliknya, jika rasio efektifitas PAD rendah, maka hal tersebut menunjukan kinerja keuangan pemerintah daerah yang kurang baik. Indikator rendah atau tingginya kinerja keuangan berdasarkan rasio efektivitas dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan.

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi memberikan gambaran tentang seberapa efektif suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah, dalam menggunakan sumber daya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Menurut Widodo dalam Trianto (2016:70), mengatakan rasio efisiensi berfokus pada ikatan antara *input* (sumber daya yang digunakan) dan *output* (hasil yang dicapai).

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas membantu dalam memahami bagaimana pemerintah daerah membagi anggaran mereka antara pengeluaran rutin (operasional) dan investasi jangka panjang (modal).

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan penting guna menilai stabilitas dan kemajuan keuangan pemerintah daerah. penilaian rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk menganalisis

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan, meneliti dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang hanya menggambarkan isi suatu variabel dalam penelitian, tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif

kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan, mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena dengan data (angka) apa adanya tanpa bermaksud menguji suatu hipotesis tertentu (Sulistiyawati, Wahyudi, & Trimuryono, 2022). Menurut Hardani (2020), penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang terstruktur terhadap fenomena serta hubungannya.

a. Populasi

Menurut sugiyono (2022), populasi dalam penelitian merupakan keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik spesifik, yang menjadi fokus penelitian yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, populasi yang digunakan adalah laporan keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Sample

Sugiyono (2022) menyatakan sample adalah bagian dari populasi yang memiliki sebagian karakteristik dan jumlah yang ada pada populasi. Jika populasinya besar dan peneliti tidak dapat memeriksa semua populasi, misalnya karena pendanaan, energy dan waktu terbatas, peneliti dapat menggunakan sample yang dikeluarkan dari populasi, apa yang dipelajari dari sampel merupakan kesimpulan pada populasi, maka sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar mewakili. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu bagian dari laporan keuangan di BPSDM yaitu laporan realisasi anggaran selama 3 tahun periode anggaran antara lain periode tahun 2021-2023.

Ada beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh penjelasan dan mengumpulkan informasi melalui sesi tanya jawab. Proses ini dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung maupun melalui telekomunikasi, baik dengan menggunakan pedoman maupun tanpa pedoman. Intinya, wawancara adalah sebuah aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan dan menggali informasi secara mendalam mengenai suatu isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.

b. Observasi

Observasi, atau pengamatan, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencatatan perilaku subjek (individu), objek (benda), maupun suatu peristiwa tanpa adanya interaksi verbal atau komunikasi dengan pihak yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis atau tercetak, baik yang dihasilkan oleh individu maupun institusi. Teknik ini berfokus pada penggunaan dokumen sebagai sumber informasi utama dalam penelitian.

Dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif deskriptif yang difungsikan guna menguji data dalam riset ini dihitung dengan menentukan rasio antara pendapatan dan belanja daerah. Seperti Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas yang meliputi belanja Operasional dan belanja modal, serta Rasio Pertumbuhan Penapatan.

a. Rasio Efektivitas PAD

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio Efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Efisiensi

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

c. Rasio Aktivitas

Rumus yang digunakan untuk menentukan rasio belanja operasional yaitu:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Rumus yang digunakan untuk menentukan rasio belanja pembangunan yaitu:

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

d. Rasio Pertumbuhan

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan yaitu:

$$\text{persentase pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1} \times 100\%$$

(keterangan: p = tahun yang dihitung, $p-1$ = tahun sebelumnya)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jangka waktu untuk melaksanakan penelitian ini selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Tugas yang diemban oleh BPSDM paling utama adalah menyelenggarakan guna penunjang pemerintahan, khususnya dalam bidang pendidikan serta pelatihan yang mencakup sertifikasi kompetensi, pengembangan kapabilitas teknis inti, peningkatan kompetensi teknis umum, pengelolaan kelembagaan, dan pengembangan kompetensi manajerial yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kantor BPSDM berlokasi di Jalan Kolonel Masturi, KM 3.5, Cipageran, Kota Cimahi.

Analisis kinerja keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dihitung menggunakan

a. Rasio Efektivitas PAD

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Susanto 2014

Rasio Efektivitas Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 6.310.863.333}}{\text{Rp. 6.063.260.000}} \times 100 \\ &= 104\% \end{aligned}$$

Rasio Efektivitas Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 3.216.020.000}}{\text{Rp. 1.384.920.000}} \times 100 \\ &= 232\% \end{aligned}$$

Rasio Efektivitas Tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 11.308.927.000}}{\text{Rp. 11.986.237.000}} \times 100 \\ &= 94\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil kalkulasi rasio efektivitas tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari perhitungan rasio pada tahun 2021 yang mencapai 104%, mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan melampaui target yang telah ditentukan. Pada tahun 2022, rasio efektivitas mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 232%, yang menunjukkan realisasi penerimaan jauh melebihi target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2023, rasio efektivitas mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hanya mencapai 94%, dan realisasi penerimaan pada tahun tersebut belum berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

b. Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang Dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Susanto 2014

Rasio Efisiensi 2021

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 59.392.221.699}}{\text{Rp. 61.870.172.748}} \times 100\% \\ &= 96\% \end{aligned}$$

Rasio Efisiensi 2022

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 58.752.433.423}}{\text{Rp. 60.653.763.059}} \times 100\% \\ &= 97\% \end{aligned}$$

Rasio Efisiensi 2023

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 71.075.812.479}}{\text{Rp. 75.706.048.836}} \times 100\% \\ &= 94\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi tersebut, diperoleh angka sebesar 96% pada tahun 2021, 97% pada tahun 2022, dan 94% pada tahun 2023. Dengan demikian, hasil perhitungan rasio efisiensi di BPSDM Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2021 hingga 2023 dapat dikategorikan kurang efisien, dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar 95,6%. Hal ini mengimplikasikan bahwa untuk menghasilkan keluaran (output) yang optimal, BPSDM Provinsi Jawa Barat mengeluarkan biaya yang relatif besar.

c. Rasio Aktivitas

Perhitungan tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} &= \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 59.267.811.699}}{\text{Rp. 65.703.085.032}} \times 100\% \\ &= 90\% \end{aligned}$$

Perhitungan tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} &= \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 58.440.388.084}}{\text{Rp. 61.968.453.423}} \times 100\% \\ &= 94\% \end{aligned}$$

Perhitungan tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} &= \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 69.390.763.609}}{\text{Rp. 82.384.739.479}} \times 100\% \\ &= 84\% \end{aligned}$$

Perhitungan tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} &= \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 25.675.882.234}}{\text{Rp. 65.703.085.032}} \times 100\% \\ &= 39\% \end{aligned}$$

Perhitungan tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} &= \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 20.127.831.896}}{\text{Rp. 61.968.453.423}} \times 100\% \\ &= 32\% \end{aligned}$$

Perhitungan Tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} &= \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 35.836.515.616}}{\text{Rp. 82.384.739.479}} \times 100\% \\ &= 43\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio diatas maka dapat dilihat bahwa BPSDM Provinsi Jawa Barat lebih besar menggunakan pendapatannya untuk belanja operasional selama tahun periode 2021-2023 dibanding untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat. Dilihat untuk belanja rutin pada tahun 2021 sebesar 90%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yaitu 94%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu 84%. Sedangkan untuk belanja (investasi) sarana dan prasarana masih sangat kecil. Pada tahun 2021 hanya mencapai 39%. Pada tahun 2022 semakin mengalami penurunan yaitu 32%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan yaitu 43%. Maka dapat disimpulkan untuk memprioritaskan belanja belum optimal yang mana di BPSDM belanja yang digunakan masih besar untuk belanja operasional sedangkan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

2. Rasio Pertumbuhan

Perhitungan Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{persentase pertumbuhan PAD} &= \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 6.310.863.333} - \text{Rp. 4.086.640.000}}{\text{Rp. 4.086.640.000}} \times 100\% \\ &= 54\% \end{aligned}$$

Perhitungan Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{persentase pertumbuhan PAD} &= \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1} \times 100 \\ &= \frac{\text{Rp. 3.216.020.000} - \text{Rp. 6.310.863.333}}{\text{Rp. 6.310.863.333}} \times 100\% \\ &= -49\% \end{aligned}$$

Perhitungan Tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{persentase pertumbuhan PAD} &= \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1} \times 1 \\ &= \frac{\text{Rp. 11.308.927.000} - \text{Rp. 3.216.020.000}}{\text{Rp. 3.216.020.000}} \times 100\% \\ &= 252\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio diatas untuk rasio pertumbuhan di BPSDM Provinsi Jawa Barat periode tahun 2021-2023 bisa dikatakan sangat tidak stabil dilihat dari hasil rasio pertumbuhan pada tahun 2021 mencapai 54%. Namun terjadi penurunan pada tahun 2022 yaitu -49%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan kembali yang tinggi yaitu 252%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan APBD tahun 2021–2023, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong cukup baik meskipun mengalami fluktuasi. Namun, dari sisi efisiensi, pengelolaan anggaran menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, yang

mengindikasikan kurang optimalnya penggunaan anggaran terhadap output yang dihasilkan. Rasio aktivitas mengungkapkan bahwa belanja daerah masih didominasi oleh pengeluaran operasional dibandingkan belanja modal, yang mengindikasikan perlunya reorientasi anggaran untuk mendukung kegiatan yang lebih produktif. Pertumbuhan PAD juga belum stabil, namun tetap menunjukkan potensi positif apabila dilakukan perbaikan kebijakan fiskal dan peningkatan kapasitas manajerial. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup variabel yang dianalisis serta periode waktu yang relatif singkat, sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel lain yang relevan dan memperpanjang rentang waktu penelitian agar hasilnya lebih komprehensif dan akurat. Selain itu, disarankan kepada BPSDM untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan penggunaan anggaran, khususnya dalam memperbesar alokasi belanja modal demi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023 Tumbuh 5,04 Persen (y-on-y)*.
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2020). *Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Fauziah, S., & Suantha, K. K. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pasirpogor. *YUME: Journal of Management*, 8(1), 725-735.
- Genasih, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Riset*, 1(1), 1–10
- Hardani, et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Kartika, D., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2009-2013. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 1(1), 1-15.
- Meiriki, A. (2020). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Humanika*, 29(1), 1-10.
- Rismayanti, R. (2024). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Kompasiana.
- Saknosiwi, Y. S., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(03).
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatera). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 679–692.

- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Edisi ke-26). Bandung: Alfabeta.
- Sulistyawati, E., Wahyudi, A., & Trimuryono, R. A. (2022). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Susanto, H. (2019). *Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 81-92
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 81–92.
- Trianto, A. (2016). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang*. Palembang: Politeknik Darusalam.